



Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Timbulnya Penyakit HIV-AIDS Pemerintah Kabupaten Jember

Yosvico Rafel Destrio

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4096>

*Correspondence: Yosvico Rafel Destrio

Email:

rafelyosvico@gmail.com

Received: 03-03-2025

Accepted: 14-04-2025

Published: 30-05-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the Jember District Government's policy in preventing the spread of HIV/AIDS, a health issue that continues to pose a serious threat both nationally and globally. Jember District recorded a significant number of HIV/AIDS cases by 2024, thus encouraging the local government to implement various prevention policies and programs. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through observation and documentation to evaluate the effectiveness of local policies, identify barriers, and formulate alternative solutions. The results show that prevention policies have been implemented through the provision of health services, educational campaigns, and collaboration with NGOs and international organizations. However, challenges such as social stigma, budget constraints, lack of community participation, and lack of inter-agency coordination remain major obstacles. This study highlights the importance of a community-based approach involving community leaders and religious leaders in education and stigma reduction efforts. More innovative, inclusive and sustainable strategies are needed to improve policy effectiveness, including strengthening coordination between agencies and developing programs based on local values. This research is expected to serve as a reference for more comprehensive policy development in other regions facing similar challenges.

Keywords: HIV/AIDS, Government, Policy Analysis

Pendahuluan

HIV/AIDS adalah salah satu masalah kesehatan yang telah menjadi perhatian global selama beberapa dekade terakhir dimana permasalahan ini masih belum bisa teratasi. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan, jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Sejak pertama kali dilakukan indentifikasi, HIV/AIDS telah menyebabkan jutaan hingga ribuan jiwa meangalami kematian diseluruh dunia dan hal ini masih menjadi ancaman yang serius. Dampak HIV/AIDS tidak hanya dirasakan dalam lingkup kesehatan individu, tetapi juga meluas hingga ke aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius dengan angka prevalensi yang terus meningkat, termasuk di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Jember. Di tahun 2024

Kabupaten Jember telah mencatat 600 orang yang telah terjangkit penyakit HIV/AIDS (Bagus Supriadi, 2024). Kabupaten Jember, sebagai salah satu wilayah dengan populasi yang beragam, menghadapi tantangan besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini diakibatkan oleh Tingginya mobilitas penduduk, rendahnya tingkat edukasi terkait HIV/AIDS, serta adanya stigma sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi faktor-faktor yang memperburuk situasi. Stigma ini seringkali menghalangi individu untuk melakukan tes, menerima pengobatan, atau terlibat dalam program edukasi dan pencegahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun organisasi lainnya. Tingginya pergaulan bebas beserta seringnya berganti-ganti pasangan merupakan salah satu hal utama yang menimbulkan permasalahan tersebut.

Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Sebagai seorang pengambil kebijakan di tingkat lokal, pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program yang dapat mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta memberikan dukungan kepada ODHA. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan yang memadai, program edukasi dan sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional. Di Kabupaten Jember, kebijakan ini diimplementasikan melalui Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) berbagai macam program diantaranya, seperti kampanye kesehatan di komunitas, edukasi di sekolah, dan penyediaan pengobatan antiretroviral (ARV), pelatihan bagi tenaga kesehatan, berkolaborasi dengan masyarakat sipil telah dijalankan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya koordinasi antara pihak-pihak terkait menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat juga menjadi penghalang utama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Banyak individu yang enggan untuk melakukan tes HIV karena takut akan diskriminasi yang ada, yang dimana pada akhirnya dapat memperburuk situasi epidemi di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan lokal yang telah diimplementasikan, identifikasi kendala yang dihadapi, serta pencarian solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan program. Dengan memahami dinamika kebijakan dan tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menanggulangi HIV/AIDS di tingkat daerah. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat kebijakan yang ada. Para ahli kesehatan masyarakat menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan HIV/AIDS dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Edukasi terkait penyebaran beserta pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan secara langsung di komunitas, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, lebih mampu dalam mengatasi stigma dan mengubah perilaku berisiko beserta memberikan pemahaman lebih mendalam. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan pihak LSM dan organisasi internasional memberikan peluang untuk memperluas cakupan program dan menjangkau kelompok-

kelompok yang sulit untuk diakses oleh pemerintah daerah. Edukasi sejak dini dan disekolah juga membantu dalam proses pencegahan penularan HIV/AIDS. Pemberian layanan kesehatan yang gratis beserta memberikan layanan cek kesehatan keliling di berbagai wilayah akan memberikan dampak baik bagi proses pencegahan, dimana hal tersebut dapat kita gunakan untuk mengetahui orang yang sedang menderita penyakit tersebut untuk dapat kita cegah melakukan penularan beserta kita bantu proses perawatan mereka. Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa, sehingga upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan secara lebih efektif di tingkat nasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam dinamika penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi non-partisipatif dan dokumentasi, dengan sumber data berupa literatur akademik, kebijakan pemerintah, dan laporan terkait HIV/AIDS. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks, seperti hambatan implementasi dan peran pemangku kepentingan lokal. Observasi dilakukan dengan mencatat aktivitas layanan kesehatan, kegiatan edukasi, serta interaksi antara petugas dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah pengorganisasian data melalui kategorisasi, penguraian pola melalui hasil temuan, dan melakukan penarikan kesimpulan untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Jember telah diterapkan melalui berbagai program yang dirancang untuk mengurangi penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Pemerintah daerah berperan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ini, yang mencakup pembuatan peraturan daerah, sosialisasi, edukasi masyarakat, dan penyediaan layanan kesehatan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu langkah utama pemerintah daerah adalah penyusunan kebijakan kesehatan yang difokuskan pada pencegahan HIV/AIDS. Melalui kebijakan resmi, seperti peraturan daerah dan keputusan bupati, kerangka kerja untuk pencegahan HIV/AIDS telah ditetapkan. Kebijakan ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penyediaan pengobatan antiretroviral (ARV), dan pelaksanaan program edukasi. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan instansi kesehatan lokal untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Edukasi dan sosialisasi merupakan komponen penting dari kebijakan ini. Kampanye dilakukan di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya

HIV/AIDS, cara penularannya, dan langkah pencegahannya. Program edukasi difokuskan pada kelompok rentan, termasuk remaja, komunitas berisiko tinggi, dan kelompok masyarakat umum. Di sekolah, misalnya, materi mengenai HIV/AIDS disisipkan dalam kurikulum pendidikan kesehatan, sementara di komunitas, kampanye dilakukan melalui seminar, penyuluhan, dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya. Pendekatan ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Penyediaan layanan kesehatan untuk ODHA menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah telah memperkuat peran puskesmas dan rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan bagi ODHA. Layanan ini mencakup konseling, pengobatan ARV, dan pemeriksaan rutin. Namun, meskipun layanan ini tersedia, beberapa ODHA enggan untuk mengaksesnya karena stigma sosial yang masih kuat. Banyak individu yang merasa takut akan diskriminasi, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat, sehingga memilih untuk menyembunyikan status mereka. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. LSM memberikan kontribusi melalui pelatihan tenaga kesehatan, pengadaan materi edukasi, dan pendanaan program. Mereka juga berperan dalam menjangkau kelompok rentan yang sulit diakses oleh pemerintah, seperti pekerja seks dan pengguna narkoba suntik. Kolaborasi ini memungkinkan program pencegahan HIV/AIDS memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial terhadap ODHA, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam program kesehatan. Di banyak komunitas, HIV/AIDS masih dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak bermoral, sehingga individu yang terinfeksi sering kali dikucilkan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang membatasi skala dan cakupan program. Banyak program yang dirancang dengan baik, tetapi tidak dapat dijalankan secara optimal karena kekurangan dana dan sumber daya manusia.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan HIV/AIDS menjadi hambatan signifikan. Meskipun kampanye edukasi telah dilakukan secara intensif, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak individu yang tidak memahami pentingnya pencegahan atau merasa bahwa mereka tidak berisiko terkena HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan personal untuk meningkatkan efektivitas program edukasi. Evaluasi terhadap program yang telah berjalan juga menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Tanpa koordinasi yang baik, program sering kali berjalan secara terpisah tanpa sinergi yang optimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan komunitas, peningkatan kapasitas tokoh masyarakat, dan pengembangan program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, keterlibatan pemimpin agama dan tokoh budaya lokal dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong perubahan

perilaku yang positif. Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Jember telah memberikan dampak yang positif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Upaya yang lebih intensif dalam mengatasi stigma, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pencegahan HIV/AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Jember telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menanggulangi penyebaran penyakit ini melalui penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan program edukasi, serta penyediaan layanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini didukung oleh kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional, yang memungkinkan program memiliki cakupan lebih luas dan menjangkau kelompok masyarakat yang rentan. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti stigma sosial, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu ada langkah-langkah strategis yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, memastikan alokasi anggaran yang memadai, dan mengembangkan program edukasi yang inovatif dan berbasis komunitas. Pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal dapat menjadi kunci dalam mengurangi stigma sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pencegahan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS. Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk mengikuti program edukasi, mendukung ODHA, dan menghindari perilaku berisiko. Selain itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan HIV/AIDS, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan sosial yang relevan dengan nilai-nilai lokal.

Referensi

- Achoki, T. (2022). Health trends, inequalities and opportunities in South Africa's provinces, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease 2019 Study. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 76(5), 471-481, ISSN 0143-005X, <https://doi.org/10.1136/jech-2021-217480>
- Afnan-Holmes, H. (2015). Tanzania's Countdown to 2015: An analysis of two decades of progress and gaps for reproductive, maternal, newborn, and child health, to inform priorities for post-2015. *The Lancet Global Health*, 3(7), ISSN 2214-109X, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)00059-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00059-5)
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policy: Perspectives and Choices*. Cengage Learning.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective*

Problem Solving. CQ Press.

- Black, R.E. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 8. summary and recommendations of the expert panel. *Journal of Global Health*, 7(1), ISSN 2047-2978, <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010908>
- Chanda-Kapata, P. (2022). Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria Health Services in sub-Saharan Africa – A Situation Analysis of the Disruptions and Impact of the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Infectious Diseases*, 124, ISSN 1201-9712, <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.03.033>
- Chang, A.Y. (2019). Past, present, and future of global health financing: A review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995-2050. *The Lancet*, 393(10187), 2233-2260, ISSN 0140-6736, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30841-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30841-4)
- Chirwa, G.C. (2020). “Who knows more, and why?” Explaining socioeconomic-related inequality in knowledge about HIV in Malawi. *Scientific African*, 7, ISSN 2468-2276, <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00213>
- Cluver, L.D. (2019). Improving lives by accelerating progress towards the UN Sustainable Development Goals for adolescents living with HIV: a prospective cohort study. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 3(4), 245-254, ISSN 2352-4642, [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30033-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30033-1)
- Dong, X. (2018). HIV-related stigma and discrimination amongst healthcare providers in Guangzhou, China. *BMC Public Health*, 18(1), ISSN 1471-2458, <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5654-8>
- Ferrari, A.J. (2024). Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 403(10440), 2133-2161, ISSN 0140-6736, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00757-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00757-8)
- Gus Supriadi, G. K. (2024, 12 17). 600 Warga Jember Terjangkit HIV/AIDS pada 2024, Termuda Usia 15 Tahun.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publications.
- Kumar, R. (2014). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. SAGE Publications.
- Lahme, A.M. (2018). Factors impacting on menstrual hygiene and their implications for health promotion. *Global Health Promotion*, 25(1), 54-62, ISSN 1757-9759, <https://doi.org/10.1177/1757975916648301>
- Nyblade, L. (2021). Stigma reduction: an essential ingredient to ending AIDS by 2030. *The Lancet HIV*, 8(2), ISSN 2352-3018, [https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(20\)30309-X](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30309-X)
- Rahman, A., & Hasan, M. (2021). "The Role of Local Government in HIV/AIDS Prevention: A Case Study in Indonesia." *Journal of Public Health Policy*, 42(3), 345-360.
- Sgaier, S.K. (2014). Achieving the HIV Prevention Impact of Voluntary Medical Male Circumcision: Lessons and Challenges for Managing Programs. *PLoS Medicine*, 11(5), ISSN 1549-1277, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001641>
- Supriadi, D. (2023). "Community Engagement in HIV/AIDS Prevention Programs: A Necessity." *Indonesian Journal of Public Health*, 15(2), 123-134.
- UNAIDS. (2022). *Global AIDS Update 2022*. Geneva: United Nations.
- Vladescu, C. (2016). Romania: Health System Review. *Health systems in transition*, 18(4), 1-170, ISSN 1817-6127
- WHO. (2023). *HIV/AIDS Fact Sheet*. World Health Organization. Retrieved from [WHO website](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids).
- World Health Organization (WHO). (2023). *HIV/AIDS Fact Sheet*. Retrieved from [WHO website](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids).